

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Senin, 05 Desember 2016
Waktu	: Pukul 10.30 – 15.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penjelasan Kapolri terhadap hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">➤ Kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2017 serta alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.➤ Perkembangan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Sdr.BasukiTjahaya Purnama, kasus Buni Yani, dan penangkapan aktivis HMI pasca demo tanggal 4 November.➤ Penanganan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian publik.➤ Tindaklanjut kesimpulan dan pengaduan masyarakat yang telah disepakati dan diserahkan dalam Rapat Kerja sebelumnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Negara RI dibuka pukul 10.30 WIB, oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR.Benny K Harman, SH.dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kepala Kepolisian Negara RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2017 serta alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.
 - b. Perkembangan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Sdr.Basuki Tjahaya Purnama, kasus Buni Yani, dan penangkapan aktivis HMI pasca demo tanggal 4 November.
 - b. Penanganan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian publik.
 - c. Tindaklanjut kesimpulan dan pengaduan masyarakat yang telah disepakati dan diserahkan dalam Rapat Kerja sebelumnya.

2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan tentang kelompok yang di duga melakukan pendorong sebagaimana yang disebut oleh Kapolri.
 - Meminta penjelasan terkait dengan dugaan tindakan makar, apakah sudah sampai ke daerah atau hanya di pusat. Bagaimana upaya pengamanan dalam rangka Natal, Tahun baru, dan Pilkada serentak.
 - Meminta penjelasan terkait tindakan *preventive justice* yang telah dilakukan oleh Polri, konsep *preventive justice* dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meminta penjelasan terkait konsep *preventive justice* yang akan dikembangkan oleh Polri.
 - Meminta penjelasan terkait peristiwa 212, seperti di Lampung dan Sumatera terkesan ada larangan untuk datang ke Jakarta. Terkait dengan adanya kasus penistaan agama sudah banyak preseden dan yurisprudensi, mohon agar proses hukum dapat dilaksanakan. Terkait dengan hadirnya saksi ahli adalah untuk mencari dan menggali buktinya bukan untuk meringankan.
 - Meminta kepada Polri agar Pilkada serentak dapat dilakukan dengan aman dan damai.
 - Meminta penjelasan terkait dengan berapa biaya penanganan demo yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.
 - Meminta penjelasan terkait kasus meninggalnya Mahasiswa Rio Wahyudi di Sumatera Barat pada tahun 2015 yang sampai saat ini belum terungkap, ada indikasi dari Irwasum Polri dan Irwasda Polda Sumbar yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan bunuh diri tetapi berdasarkan hasil autopsy bukan merupakan bunuh diri. Hal ini agar dapat diungkap demi keadilan hukum.
 - Bahwa peningkatan pengamanan Pilkada di daerah rawan seperti di Aceh, Jakarta, dan Papua harus ditingkatkan, mengingat banyaknya terjadi kekerasan, seperti kekerasan bersenjata di Aceh, masih sedikit dari aksi kekerasan tersebut yang ditindaklanjuti hingga pengadilan yang berimbas pada kekecewaan di masyarakat.
 - Meminta penjelasan terkait persoalan yang dituduhkan kepada beberapa aktivis yang dituduh melakukan makar, sebab dari segi usia, kondisi, dan akses terhadap upaya makar tidak sesuai logika untuk mampu melakukan

tindakan makar. Dikhawatirkan Polri akan menjadi represif terhadap perbedaan pendapat.

- Meminta ketegasan Polri untuk menelusuri portal berita dan akun media sosial yang isinya dapat memprovokasi masyarakat.
- Meminta agar kedepan dalam rangka penyelesaian masalah, polisi harus banyak turun kelapangan, seperti Kapolri yang mau turun sejajar dengan masyarakat
- Bahwa belum terlihat didalam paparan adanya anggaran Polri untuk Pilkada serentak. Meminta penjelasan terkait adanya penyebaran himbauan/selebaran/maklumat yang disampaikan melalui helikopter.
- Bahwa kejadian 411 dan 212 adalah berkah bagi bangsa Indonesia dan sebagai ujian demokrasi bagi Bangsa Indonesia. Polri membuktikan mampu mengamankan dan menegakkan hukum. Apakah Kapolri punya penghargaan terhadap anggota yang sudah bertugas dengan baik pada saat aksi tersebut. Bagaimana langkah antisipasi polri dalam menghadapi Pilkada serentak. Terkait dengan Polres-Polres pemekaran yang sampai saat ini belum disetujui oleh Menpan, sehingga kehadiran anggota Polri di daerah pemekaran sangat minim.
- Terkait dengan peningkatan Polda NTT ke Tipe A, dalam kasus *human trafficking*, apabila tidak segera dilakukan penanganan yang komprehensif dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas.
- Meminta penjelasan terhadap Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP poin 2 dan poin 5 mengenai penyelidikan dan penyidikan, terhadap penanganan suatu kasus diharapkan tidak terulang lagi.
- Anggaran Polda dan Polres hanya cukup untuk 10 bulan, maka apabila ada laporan yang masuk pada bulan berikutnya menjadi terhambat, meminta agar Kapolri mencari solusi.
- Terkait dengan kasus Karhutla, hanya 3 (tiga) yang sudah ada SPDPnya, bagaimana bisa SP3 diterbitkan tanpa ada SPDP dan tanpa ada tersangka, seharusnya yang diterbitkan adalah SP2HP.
- Bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Sdr.Ahok, apabila ditangani sejak awal maka penyelesaiannya tidak akan sulit. Banyak pengaduan terkait dengan demo 4 November, agar kedepannya Polri lebih simpatik dalam menangani unjuk rasa, mengingat Komisi III DPR RI ingin menjaga agar Polri tetap dicintai masyarakat.

3. Beberapa hal penjelasan dari Kapolri diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kasus yang melibatkan Sdr. Buni Yani yang dikenakan UU ITE karena dianggap menyebarkan berita bohong dan melakukan pemotongan teks.
- Adanya Kasus penodaan agama di Jawa Tengah, yaitu merobek Kitab Suci Al-Quran, kasus yang dialami Arswendo dan kasus Lia Eden dimana pembuktiannya sangat mudah berbeda dengan kasus yang dialami oleh Sdr.Ahok.
- Terkait dengan tuntutan atas penangkapan Sdr. Basuki Tjahaya Purnama, GNPF MUI menyampaikan akan melakukan aksi di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin, Polri mengambil tindakan tegas terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum. Berdasarkan ketentuan

perundang-undangan boleh dilakukan asal tidak mengganggu ketertiban umum.

- Ketua MUI menyampaikan bahwa gerakan GNPf MUI bukan merupakan inisiatif MUI, oleh sebab itu pengurus MUI Pusat dan Polri melakukan *press release* dan meminta agar GNPf menanggalkan atribut MUI, mengingat dikhawatirkan dapat dianggap sebagai intruksi dari pusat untuk di laksanakan di daerah-daerah. Oleh karena itu Kapolda Metro Jaya menerbitkan Maklumat untuk tidak melakukan aksi di Sudirman-Thamrin dalam hal ini melaksanakan Shalat Jumat di jalan protokol Jakarta yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Ada indikasi pemufakatan jahat yang berujung pada makar yang di khawatirkan dapat mengganggu aksi damai 212 dan memanfaatkan jumlah massa yang sangat besar. Penyampaian aspirasi ke DPR dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan koridor hukum, tetapi menduduki DPR secara paksa apapun alasannya merupakan tindakan inkonstitusional.
- Penangkapan 11 orang dilakukan agar tidak ada aksi di luar aksi damai 212 yang ingin memanfaatkan jumlah massa yang besar untuk di *hijack* menduduki DPR RI. Delapan orang tidak ditahan dengan pertimbangan kesehatan seperti Ibu Rachmawati dan sisanya tidak cukup bukti. Sedangkan 3 orang lainnya di tahan dan selanjutnya akan di lakukan proses hukum.
- Adanya anggota HMI yang di tangkap pada saat aksi 4/11 memang terbukti melakukan tindakan pemukulan terhadap anggota Polri.
- Gerakan saber pungli sudah melakukan berbagai penindakan seperti di Kemenhub, pelabuhan, Bulog, dan sebagainya yang terus berlanjut di dalam internal Polri sendiri dan diluar Polri.
- Terkait dengan *preventive justice* sebaiknya dimasukan kedalam KUHAP. Dalam proses hukum di Indonesia, hukum harus fokus untuk mengendalikan kejahatan yang mengutamakan *national security dan civil liberty*.
- Pasal 6 UU No 9 Tahun 1998 berisi ketentuan yang membatasi kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dimuka umum tidak boleh melanggar ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Selanjutnya di dalam Pasal 15 Polri dapat membubarkan massa apabila melanggar ketentuan Pasal 6.
- Terkait dengan massa yang berasal dari wilayah, banyak dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat Kepolisian, hal ini mengacu pada kesepakatan dengan GNPf bahwa tidak boleh membawa senjata tajam, hanya membawa perlengkapan ibadah dan Al-Quran, sehingga ketika memasuki Jakarta sudah steril dari bom dan senjata tajam.
- Kasus di Tulang Bawang terkait dengan sengketa tanah akan dilakukan pengecekan.
- Dalam kasus AKBP Brotoseno adalah kasus pidana suap.
- Bahwa biaya penanganan aksi tanggal 4 November 2016 hampir Rp.33 M dengan melibatkan 22.000 personel, untuk biaya penanganan aksi 2 Desember mencapai Rp.43 M dengan melibatkan 27.000 personel.
- Bahwa untuk situasi kedepan, dari GNPf akan fokus terhadap proses persidangan.
- Dalam kasus Rio Wahyudi Polri akan menurunkan tim dari Bareskrim dan Propam untuk menyelidiki kasus ini.

- Permasalahan Pilkada di Aceh akan memperkuat pengamanan, belum tentu kekerasan yang terjadi seperti pelemparan granat berkaitan dengan persoalan Pilkada, setelah diselidiki ternyata urusan pribadi pelaku dan korban.
 - Terkait dengan penangkapan beberapa aktivis senior, dari segi usia sudah matang berpolitik dan tidak harus turun langsung, tetapi bisa membuat *design* berdasarkan pengalaman, sedangkan tokoh yang muda adalah sebagai aktor/pelaksana. Saat ini proses hukum sedang berjalan.
 - Untuk daerah terpencil belum siap dari segi jumlah personel, Polri meminta dukungan Komisi III DPR RI dalam hal anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para personel di daerah terpencil.
 - Dalam proses penyelidikan kasus, sudah dialami selama 2 (dua) bulan dan naik ke tingkat penyidikan dan akan menetapkan terlapor sebagai tersangka.
 - Bahwa anggaran Polri di potong Rp.2.3 T sebagai bagian dari kebijakan penghematan K/L yang sebagian besar pada dana operasional, saat itu dipotong di bulan 9 sehingga dampaknya terlihat pada bulan ke-10 hingga ke-12 yang berimbas pada kurangnya dana. Polda dan Polres sangat merasakan imbas penghematan anggaran ini.
4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia mengambil keputusan/kesimpulan, yaitu:

1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi, dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Sebaliknya terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri tidak segan-segan untuk menyelesaikannya.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih mengedepankan langkah preventif dan preemtif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat dimuka umum sebagaimana dijamin konstitusi.

Rapat Kerja ditutup Pukul.15.50.

